

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Rusia adalah salah satu negara yang menjadi penguasa sistem multipolar saat ini. Sebelumnya pada era 90-an Rusia hanyalah negara pewaris terbesar Uni Soviet yang masih dalam pemulihan kondisi ekonomi pasca pecahnya Uni Soviet. Tetapi memasuki awal tahun 2000-an, Rusia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin menjadi salah satu kekuatan besar dunia seperti saat ini. Hal ini pulalah yang menjadi latar belakang dari terjadinya konflik perebutan wilayah antara Rusia dengan Georgia pada tahun 2008.

Konflik yang terjadi di bulan Agustus 2008 bermula ketika pada waktu itu Georgia melakukan penyerangan terhadap wilayah Ossetia Selatan (yang masih dianggap kedaulatan Georgia) dan banyak memakan korban warga sipil beretnis Rusia serta banyak melukai tentara penjaga perdamaian Rusia. Hal ini tidak dapat diterima Rusia begitu saja sehingga kemudian Rusia melancarkan serangan balik untuk membalas serangan Georgia di wilayah Ossetia Selatan. Kemudian pecahlah perang militer antara pasukan Rusia dengan pasukan Georgia di wilayah Ossetia Selatan selama lima (5) hari di bulan Agustus tahun 2008.

Penyebab pasti timbulnya perang di wilayah Ossetia Selatan adalah Rusia yang ingin melindungi warganya yang berada di Ossetia Selatan, dan membantu Ossetia Selatan untuk lepas dari kedaulatan Georgia. Ossetia Selatan merasa bahwa kebijakan-kebijakan Georgia tidak lagi menguntungkan bagi wilayahnya sehingga alangkah lebih baik jika Ossetia Selatan berpisah dengan Georgia dan dapat bergabung dengan Rusia. Tentu saja hal ini mendapat sambutan hangat dari Rusia yang bersedia membantu Ossetia Selatan karena faktor mayoritas warga Ossetia Selatan adalah etnis Rusia yang sudah seharusnya Rusia membantu warga etnisnya. Pasca perang tahun 2008, kebijakan luar negeri Rusia pun berubah terhadap Georgia, Rusia beranggapan bahwa dunia ini harus multipolar, Rusia tidak menginginkan dunia ini diatur oleh satu kekuatan saja.

Pemerintahan Dmitry Medvedev tetap mengadopsi kebijakan Putin dengan menambahkan beberapa hal dalam kebijakan luar negeri Rusia antara lain:

- a. Menciptakan kondisi eksternal modernisasi di Rusia.
- b. Memperkuat hubungan luar negeri, transformasi dan inovasi bidang ekonomi, perlindungan HAM.
- c. Memastikan peranan internasional Rusia di kancah internasional.

Dengan program-program yang dicanangkan oleh Medvedev yang sekiranya mampu membawa Rusia menjadi salah satu pemain utama di ranah internasional. Dalam melihat kebijakan luar negeri Rusia, Medvedev menguraikan lima hal mendasar yang menjadi kebijakan luar negeri Rusia yang termaktub ke dalam Doktrin Medvedev. Adapun Doktrin militer Rusia yang dikeluarkan oleh Medvedev terdiri dari :

- a. Rusia menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan hukum internasional yang saat ini sudah berlaku dalam menjalin hubungan antar negara,
- b. Dunia ini harus multipolar, Rusia tidak menginginkan dunia ini diatur oleh satu kekuatan,
- c. Rusia tidak menginginkan terjadinya konfrontasi dengan negara manapun dan Rusia bermaksud ingin menjalin hubungan baik dengan setiap negara,
- d. Prioritas utama Rusia adalah melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada dan melindungi kepentingan luar negerinya. Rusia mengancam akan bertindak tegas terhadap siapapun yang mengancam warga negaranya,
- e. Rusia memiliki kepentingan di dalam suatu wilayah tertentu, dimana wilayah tersebut terdapat negara-negara yang sudah terjalin hubungan baik serta negara-negara yang memiliki hubungan khusus secara historis, khususnya negara anggota CIS.

Dalam rangka merespon tindakan Georgia yang lebih dulu melakukan serangan terhadap gerakan separatis Ossetia Selatan yang ingin memerdekakan hingga kemudian banyak pasukan militer Rusia dan warga sipil yang menjadi

korban, maka Dmitry Medvedev mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Georgia meliputi 4 (empat) poin penting yaitu :

- a. Pemimpin-pemimpin Georgia bertanggung jawab atas aksi kekerasan yang menimpa warga Ossetia Selatan selama 15 tahun terakhir.
- b. Serangan terhadap warga dan personel militer Rusia yang ditempatkan di Ossetia Selatan yang bertugas sebagai tentara penjaga perdamaian harus dibalas.
- c. Pemimpin-pemimpin Georgia melancarkan serangannya untuk menuntaskan masalah Ossetia Selatan secara tuntas, sehingga Rusia memiliki kewajiban untuk mencegah agresi serta genosida terhadap penduduk Ossetia Selatan.
- d. Sebagai negara yang mematuhi hukum internasional, Rusia bertindak untuk membela warganya yang diserang berdasarkan prinsip pasal 51 piagam PBB tentang pembelaan diri (*self defense*).

Berdasarkan poin-poin kebijakan luar negeri Rusia terhadap Georgia diatas, dapat dijelaskan bahwa inti dari kebijakan luar negeri Rusia adalah ingin melindungi warga sipilnya yang berada di wilayah Ossetia Selatan dari ancaman yang ditebar pemerintah Georgia, serta ingin membantu Ossetia Selatan untuk lepas dari Georgia yang selama ini dirasa kurang adil terhadap Ossetia Selatan. Selain itu Rusia juga bersedia memberikan dukungannya terhadap Ossetia Selatan untuk menjadi negara sendiri dengan pengakuan dari Rusia.

Rusia tidak menginginkan terjadinya konfrontasi dengan negara manapun dan Rusia bermaksud ingin menjalin hubungan baik dengan setiap negara dan prioritas utama Rusia adalah melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada dan melindungi kepentingan luar negerinya. Rusia mengancam akan bertindak tegas terhadap siapapun yang mengancam warganya. Karena beberapa hal diatas membuat Rusia melakukan penyerangan di wilayah Ossetia Selatan untuk melindungi warga etnisnya dan membalas atas serangan Georgia yang menewaskan tentara perdamaian Rusia.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam menyikapi konflik yang terjadi antara Rusia dengan Georgia adalah untuk lebih sering melakukan diplomasi. Seharusnya sebagai negara yang sama-sama lahir dari pecahan Uni Soviet dapat membantu satu sama lain. Tetapi disini yang terjadi sebaliknya yakni konflik antara Rusia dan Georgia yang memperebutkan wilayah Ossetia Selatan. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah kedua negara seharusnya bisa berdiplomasi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak perlu terjadi konflik hingga perang yang memakan korban jiwa.

Georgia yang pertama kali melakukan serangan terhadap tentara perdamaian Rusia seharusnya bisa menahan diri agar tidak melakukan penyerangan yang memakan korban jiwa. Dampaknya pun sangat merugikan karena serangan Georgia tentu dibalas oleh Rusia yang kekuatan militernya jauh lebih kuat dibanding Georgia. Hingga kemudian timbullah perang selama lima hari di daratan Ossetia Selatan. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika kedua negara dapat menemukan solusi permasalahannya melalui diplomasi yang baik agar dapat menghindari jatuhnya warga sipil yang lagi-lagi harus menjadi korban.

Rusia melakukan hal ini karena tidak ingin perluasan anggota NATO di wilayah Eropa Timur mengganggu stabilitas keamanannya, tetapi menciptakan konflik dengan negara tetangga yang masih satu rumpun adalah cara yang salah. Hal ini menyebabkan negara yang merasa terancam dengan kebijakan luar negeri Rusia membuat pilihan untuk ikut pro terhadap Barat, AS ataupun NATO demi keamanan nasionalnya.